

SKRIPSI

**Study Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis
Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL UMRAH JAMAL

L231 16 501



**PROGRAM STUDI PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN
DEPARTEMEN PERIKANAN
FAKULTAS ILMU KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

**Study Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis
Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)
Bontobahari Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan**

Disusun dan diajukan oleh:

NURUL UMRAH JAMAL
L231 16 501

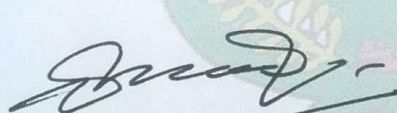
Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Program Sarjana Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin

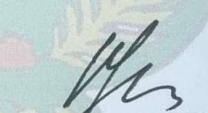
Pada tanggal 18 November 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Muh. Kurnia, S.Pi, M.Sc., Ph.D
NIP. 197206171999031003


Prof. Dr. Achmar Mallawa, DEA
NIP. 195112221976031001



Ketua Program Studi,

Mukti Zainuddin, S.Pi., M.Sc., Ph.D.
NIP. 197107031997021002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurul Umrah Jamal
NIM : L231 16 501
Program Studi : Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul

**“Study Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis Pengembangan
Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba,
Provinsi Sulawesi Selatan”**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 18 November 2021



Yang menyatakan


Nurul Umrah Jamal

ABSTRAK

Nurul Umrah Jamal. L23116501. “Study Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan” dibimbing oleh **Muhammad Kurnia** sebagai Pembimbing Utama dan **Achmar Mallawa** sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional dan pengembangan PPI Bonto Bahari.. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari – Maret 2021 di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Studi Kasus. . Data primer dikumpulkan melalui pengamatan langsung di lapangan yang meliputi jumlah kebutuhan es, air bersih, dan BBM yang dibutuhkan di PPI serta mengidentifikasi fasilitas fungsional yang berfungsi atau tidak, sedangkan data sekunder meliputi ketersediaan es, BBM dan air bersih dikumpulkan melalui wawancara.

Hasil penelitian bahwa fasilitas fungsional yang ada di PPI Bonto Bahari ialah gedung tempat pelelangan ikan, Solar Paket Diesel Nelayan), *cold storage*, pabrik es, pabrik tepung ikan, gudang listrik dan instalasi air bersih. Tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional di PPI Bonto Bahari tergolong tinggi, yaitu, tingkat pemanfaatan SPDN sebesar 79.681% dan tingkat pemanfaatan instalasi air bersih sebesar 78,6%, untuk fasilitas *cold storage*, pabrik es, pabrik tepung ikan dan gedung tempat pelelangan ikan tingkat pemanfaatannya masih rendah.

Kata Kunci : Fasilitas Fungsional, Tingkat Pemanfaatan, PPI Bonto Bahari.

ABSTRACT

Nurul Umrah Jamal. L23116501. "The Study on Utilization of Functional Facilities and Analysis of the Development of Fish Landing Base (PPI) Bonto Bahari, Bulukumba Regency, South Sulawesi Province" was supervised by **Muhammad Kurnia** as Main Advisor and **Achmar Mallawa** as Member Advisor.

This study aims to analyze the level of utilization of functional facilities at PPI Bonto Bahari and analyze the development of functional facilities at PPI Bonto Bahari. This research was conducted in February – March 2021 at PPI Bonto Bahari, Bulukumba Regency, South Sulawesi Province. The method used in this research is the Case Study method. Data collection is done in two ways, namely primary data and secondary data. Primary data was collected through direct observation in the field including the amount of ice, clean water, and fuel needed at PPI and identified functional facilities that were still functioning or not, while secondary data in the form of availability of ice, fuel and clean water were collected through calculations from interviews.

The results showed that the functional facilities at PPI Bonto Bahari were fish auction building, Solar Fisherman Diesel Package, cold storage, ice factory, fish meal factory, electricity warehouse and clean water installation. The level of utilization of functional facilities at PPI Bonto Bahari is high, namely the utilization rate of SPDN is 79.681% and the utilization rate of clean water installations is 78.6%, for cold storage facilities, ice factories, fish flour factories and fish storage buildings. auction is used, the utilization rate is still low.

Keywords: Functional Facilities, Utilization Rate, PPI Bonto Bahari.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran **Allah Subhanahu wa ta'ala** atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Study Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan**". Shalawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi **Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam** yang senantiasa menjadi penerang bagi semua umat muslim di seluruh dunia.

Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan program sarjana Stara 1 (S1) Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin. Skripsi ini berisi tentang pemanfaatan fasilitas fungsional di pangkalan pendaratan ikan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari – Maret 2021 dengan maksud sebagai bahan informasi bagi masyarakat dan terkhusus pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan pelabuhan. Selain itu sebagai informasi ilmiah tentang pelabuhan perikanan.

Segala suka dan duka yang dihadapi dalam melakukan penelitian ini merupakan salah satu proses yang berkesan bagi penulis. Semua ini tentunya tidak lepas dari banyaknya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang berjasa mulai awal masa studi hingga penyelesaian skripsi ini.

1. Terima kasih kepada kedua orang tua penulis yang tercinta dan terkasih Bapak **Jamaluddin** dan Ibu **Nurlina** yang telah menjadi orang tua yang sangat sabar dan selalu memberikan dukungan, do'a dan kasih sayang untuk penulis serta menjadi penyemangat tersendiri untuk penulis dari dulu sampai sekarang ini.
2. Bapak **Muhammad kurnia S.Pi, M.Sc., Ph.D** selaku pembimbing utama sekaligus penasehat akademik penulis yang senantiasa meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing, memberikan masukan dan motivasi serta solusi pada setiap permasalahan yang penulis hadapi sejak awal masa perkuliahan hingga akhir penyelesaian studi penulis.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Achmar Mallawa, DEA** selaku pembimbing anggota penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan

bimbingan dan solusi pada setiap permasalahan yang penulis hadapi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak **Safruddin, S.Pi., MP., Ph.D** dan Bapak **Dr. Ir. Andi Assir Marimba, M.Sc.** selaku penguji dalam penelitian yang telah memberikan banyak masukan, kritik serta saran yang membangun untuk penulis, sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Bapak/Ibu **Pegawai dan Staff Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan** yang bekerja keras membantu menyelesaikan segala bentuk administrasi yang penulis butuhkan selama penyelesaian studi ini.
6. Bapak/Ibu **Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan** yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan.
7. Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, serta pengelola pelabuhan PPI Bonto Bahari **H. Suhartono N., S.Pi., M.P., Ph.D, Andi Muhammad Iqra Kusuma Atmaja, S.H dan Gunawan** yang berperan penting dalam penelitian dan pengambilan data penulis.
8. Terima kasih kepada **Keluarga** tercinta yang selalu memberikan semangat dan nasehat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada sahabat – sahabat tercinta saya **Eka Rusdianti RN, Rezky Novianty Azis, Ainun Mahyuddin, Sri Rasni, Muh. Aswan Parawansa dan Rozman Hariady Effendy** mulai dari SMP sampai sekarang ini yang selalu memberikan semangat dan support kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini, serta selalu ada untuk penulis dalam suka maupun duka;).
10. Sahabat ku **Suarna, Aminah Kamila, Amanah** yang senantiasa selalu ada menyemangati dan menemani penulis saat suka dan duka mulai dari masa awal menjadi mahasiswa sampai pada akhir ini.
11. Untuk keluarga sekaligus temanku **Tika, Icha, Lina, Pida, Rina, Rismayani, Risma besar**, terima kasih telah menjadi teman dari kecil sampai sekarang ini, yang memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini:').
12. **Nur Fadhilla, Grace Ritonga, Chandra Siska, Setiawan Karsidi, Hasmiyati, Andi Nurmayanti dan Hasdayanti. S. Pi.** yang selalu membantu ,memberikan saran dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan **Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan #16 dan Clarias Batrachus #16**, untuk kebersamaan dan kenangan yang tidak akan terlupakan selama masa perkuliahan.
14. Keluarga **GREEN FISH UNHAS** dan **KABUT RIMBA** yang sudah menjadi keluarga kedua bagi penulis, yang mawadahi seluruh aspirasi penulis dan banyak

memberikan pengetahuan mengenai hal – hal baru serta pengalaman yang sangat berharga selama penulis menjadi mahasiswa di perikanan unhas.

15. Keluarga **KMP PSP UNHAS** yang senantiasa mawadahi seluruh aspirasi penulis selama penulis menjadi mahasiswa.
16. Teman – teman seperantauan **KKN Sebatik Unhas gel. 102 Desa Sei Limau, Kec. Sebatik Tengah, Kab. Nunukan** yang memberikan kisah dan pengalaman baru yang sangat berkesan bagi penulis, serta selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan selama perkuliahan dan dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Melalui sripsi ini penulis berharap agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi setiap orang yang membacanya. Rasa hormat dan terima kasih bagi semua pihak atas segala dukungan dan doanya, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Aamiin

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 18 November 2021

Nurul Umrah Jamal

BIODATA PENULIS



Penulis dilahirkan pada tanggal 19 April 1998 di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan bapak Jamaluddin dan ibu Nurlina. Penulis memulai pendidikan di SD Negeri 126 Pinrang dan lulus pada tahun 2010, kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Pinrang dan lulus pada tahun 2013, Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Pinrang dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016, penulis berhasil diterima pada Program Studi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (PSP) Universitas Hasanuddin Makassar melalui Jalur Mandiri atau Jalur Non Subsidi (JNS).

Selama kuliah, penulis aktif berorganisasi di UKM Mahasiswa Pecinta Alam Perikanan Green Fish UNHAS, menjabat sebagai sekretaris umum pada periode 2018-2019 selama satu triwulan menggantikan sekretaris sebelumnya, kemudian penulis kembali menjabat sebagai sekretaris umum pada periode 2019-2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan dan Kegunaan.....	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	4
A. Definisi Pelabuhan Perikanan	4
B. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).....	5
C. Fungsi Dan Peranan Pelabuhan Perikanan	5
D. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan	8
E. Tingkat Pemanfaatan, Kebutuhan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan.....	11
III. METODOLOGI PENELITIAN	14
A. Waktu dan Tempat.....	14
B. Alat dan Bahan	14
C. Metode penelitian.....	15
D. Metode Pengumpulan Data	15
E. Analisis Data	16
IV. HASIL PENELITIAN.....	19
A. Keadaan Umum Lokasi Penelitian	19
B. Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari	20
C. Keragaan Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan Bonto Bahari Saat Ini	20
D. Analisis Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional PPI Bonto Bahari.....	24
V. PEMBAHASAN	29
A. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari	30
B. Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari	30
C. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari	33
D. Analisis Pengembangan Fasilitas Fungsional Pangkalan Pendaratan Ikan Bonto Bahari.....	34
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Alat dan kegunaannya.....	14
2. Metode Pengumpulan Data.....	15
3. Penilaian fasilitas fungsional di PPI Bonto Bahari.....	16
4. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas PPI.....	18
5. Fasilitas Fungsional PPI Bonto Bahari.....	20
6. Pengembangan Fasilitas Fungsional PPI Bonto Bahari.....	29

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Peta lokasi penelitian	14
2. PPI Bonto Bahari.....	19
3. Gedung Pelelangan Ikan	21
4. Pabrik Es.....	21
5. SPDN.....	22
6. <i>Cold storage</i>	22
7. Instalasi Air Bersih.....	23
8. Gudang Listrik	23
9. Pabrik Tepung Ikan	24

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Halaman
1. Analisis perhitungan Tingkat pemanfaatan BBM Solar Paket Diesel Nelayan	39
2. Analisis perhitungan Tingkat Pemanfaatan air bersih	41
3. Foto Kegiatan Penelitian	43
4. Kuisisioner	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bulukumba adalah salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.154,67 km² dan berpenduduk sebanyak 395.560 jiwa dengan jarak tempuh dari Kota Makassar sekitar 153 Km. Secara geografis Kabupaten Bulukumba terletak pada koordinat antara 5°20" sampai 5°40" Lintang Selatan dan 119°50" sampai 120°28" Bujur Timur. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Sinjai di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bantaeng (DKP Sulawesi Selatan, <https://sulselprov.go.id/>).

Di Sulawesi Selatan, sektor perikanan Kabupaten Bulukumba memiliki merupakan komoditi unggulan dalam MP3EI, dan merupakan penhasil terbesar se Sulawesi Selatan, dengan hasil produksi perikanan laut 157.920.Ton/Tahun dan Perikanan tangkap 53.555 Ton/Tahun (BPS SULSEL 2016), besarnya produksi tersebut mengakibatkan ketuhan infrastruktur pemasaran yang baik, sehingga program NAWA CITA Presiden Jokowi Dodo ke 7 "Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan mengarahkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, poin tersebut dapat diterapkan di sektor sumber daya alam unggulan karena hasil perikanan, Indonesia menjadi potensi andalan nasional, dalam hal ini Kabupaten Bulukumba diharapkan mampu berkontribusi dan bersaing di pasar regional maupun Internasional (Risab,2017).

Pelabuhan adalah daerah perairan yang terlindung terhadap gelombang, yang dilengkapi dengan fasilitas terminal laut meliputi dermaga dimana kapal dapat bertambat untuk muat barang, keran - keran untuk bongkar muat barang, gudang laut (transito) dan tempat-tempat penyimpanan dimana kapal membongkar muatannya, dan gudang-gudang di mana barang-barang dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama selama menunggu pengiriman kedaerah tujuan atau pengapalan. Terminal ini dilengkapi dengan jalan-jalan kereta api, jalan raya atau saluran pelayaran darat. Dengan demikian daerah pengaruh pelabuhan biasa sangat jauh dari pelabuhan tersebut (Triatmodjo,1996).

Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dari ikan didaratkan hingga didistribusikan. Fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan dan sebagai fasilitas pendorong

pertumbuhan kegiatan usaha perikanan berupa; penangkapan, pengolahan dan pemasaran untuk konsumsi lokal, antar pulau maupun tujuan ekspor. Untuk tercapainya fungsi tersebut, maka pelabuhan perikanan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menampung aktivitas-aktivitas dengan baik dan tepat. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan antara lain fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan/penunjang (Agam, 2018).

Pangkalan Pendaratan Ikan adalah pelabuhan khusus yang merupakan pusat pembangunan ekonomi perikanan, baik dilihat dari aspek produksinya maupun aspek pemasarannya, maka Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan prasarana ekonomi yang berfungsi sebagai penunjang bagi perkembangan usaha perikanan laut maupun pelayaran. Pangkalan Pendaratan Ikan merupakan tempat para nelayan untuk melakukan pendaratan ikan hasil tangkapannya (Mahyuddin, 2016).

Dari hasil survei, pada saat ini kondisi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) yang ada di Bonto Bahari masih kurang baik karena ada beberapa fasilitas seperti gedung TPI belum ada aktivitas lelang dan penjualan ikan, pabrik es yang tidak difungsikan dan fasilitas pada kantor pengelola PPI Bonto Bahari belum memadai karena belum memiliki komputer sehingga dalam pelayanan SPB nelayan masih menggunakan *form* manual.

Keberlanjutan dari suatu pelabuhan perikanan sangat berpengaruh dari seberapa besar fasilitas yang ada berfungsi dengan baik, dan berpengaruh juga terhadap peningkatan pendapatan masyarakat nelayan maupun pendapatan daerah itu sendiri, sehingga dianggap perlu untuk melakukan penelitian tentang Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Fungsional dan Analisis Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dari itu hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini nantinya mampu memberikan informasi bagi pemerintah daerah untuk mengambil kebijakan dalam pembangunan khususnya pengembangan pelabuhan.

Menurut Merdekawati (2019), tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas pokok di PPI Lonrae kabupaten Bone yaitu tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 108%, maka perlu diperpanjang karena kebutuhan dermaga saat ini 160,71 m. Tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan sebesar 45,5%, maka belum perlu dilakukan pengembangan. Tingkat kebutuhan pada kedalaman perairan lebih dalam dari kedalaman perairan saat ini, maka perlu dilakukan penambahan, karena kebutuhan kedalaman perairan saat ini 3 m. Tingkat pemanfaatan daratan pelabuhan sebesar 26% maka belum perlu dilakukan pengembangan.

Salim (2018). Fasilitas-fasilitas yang ada di PPI Beba belum termanfaatkan secara optimal didapatkan bahwa lahan PPI Beba 21,88 %, dermaga 17,28%, dan TPI 0 %.

Perlu adanya usaha dari pihak pelabuhan, nelayan serta semua 11 pengguna fasilitas di PPI Beba untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas PPI di Kabupaten Takalar.

Insani (2005) dalam Agam (2018), kapasitas dan tingkat pemanfaatan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, untuk Tempat Pelelangan Ikan pemanfaatannya hanya 1,91%, dermaga tingkat pemanfaatannya 151,15%, kedalaman kolam pemanfaatannya 48,60%.

Anggi. (2018), Fasilitas fungsional PPN Sibolga yang memiliki tingkat pemanfaatan yang sangat optimal adalah rumah genset dan mesin genset yaitu sebesar 100%, yang belum mencapai optimal adalah tempat pemasaran ikan sebanyak 27%, gedung kantor sebanyak 20,86%, instalasi air sebanyak 64,5% dan pos penyuluhan sebanyak 18,4%, yang belum optimal adalah gedung bengkel dan gudang peralatan TPI yaitu sebesar 0% dan yang dimanfaatkan adalah tempat perbaikan jaring, rambu suar, workshop, kolam limbah (IPAL), dan tempat pengolahan ikan dan tempat penjemuran ikan.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

- a. Menganalisis tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional PPI Bonto Bahari
- b. Menganalisis pengembangan fasilitas fungsional di PPI Bonto Bahari

2. Kegunaan

Sebagai bahan informasi bagi pemerintah setempat dalam mengambil kebijakan untuk pembangunan khususnya pengembangan pelabuhan. Selain itu sebagai informasi ilmiah tentang pelabuhan perikanan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Pelabuhan Perikanan

Pengertian pelabuhan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR PER.08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan yaitu Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara wilayah daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas sejak ikan didaratkan sampai ikan di distribusikan (Lubis, 2006).

Pelabuhan perikanan adalah suatu wilayah perpaduan antara daratan dan lautan yang dipergunakan sebagai pangkalan kegiatan penangkapan ikan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dari ikan didaratkan hingga didistribusikan. Fungsi pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan dan sebagai fasilitas pendorong pertumbuhan kegiatan usaha perikanan berupa; penangkapan, pengolahan dan pemasaran untuk konsumsi lokal, antar pulau maupun tujuan ekspor. Untuk tercapainya fungsi tersebut, maka pelabuhan perikanan dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas yang dapat menampung aktivitas-aktivitas dengan baik dan tepat. Adapun fasilitas-fasilitas yang ada di pelabuhan perikanan antara lain fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas tambahan/penunjang (Agam, 2018).

Departemen perhubungan menggolongkan pelabuhan perikanan sebagai pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus yaitu pelabuhan yang penggunaannya khususnya untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian dalam arti luas.

Adapun Departemen Perhubungan Laut mengartikan pelabuhan adalah suatu daerah tempat berlabuh dan atau tempat bertambatnya kapal laut serta kendaraan lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang yang semuanya merupakan daerah lingkungan kerja aktivitas ekonomi, secara yuridis terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan untuk kegiatan-kegiatan di pelabuhan tersebut (Lubis, 2012).

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 604/ Kpts/OT.210/9/95 tanggal 7 September 1995 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan perikanan, bahwa pelabuhan perikanan dibagi dalam 4 (empat) kelas yakni:

1. Pelabuhan Perikanan Samudera

Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEE) Indonesia dan perairan internasional.

2. Pelabuhan Perikanan Nusantara

Pelabuhan ini direncanakan terutama untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah dan ZEE Indonesia.

3. Pelabuhan Perikanan Pantai

Pelabuhan ini direncanakan untuk mendukung kegiatan penangkapan di daerah pantai.

4. Pangkalan Pendaratan Ikan

Pangkalan pendaratan ikan ini untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai dan lokasinya tersebar di seluruh Indonesia.

B. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)

Pangkalan pendaratan ikan ini untuk mendukung kegiatan penangkapan ikan di daerah pantai dan lokasinya tersebar diseluruh Indonesia.

Fungsi dan peranan pelabuhan menurut Baskoro (1984) dalam Fitriyah (2007) yaitu sebagai tempat untuk mendaratkan ikan hasil tangkapan, pemasaran dan tempat berlabuh bagi kapal yang mengisi bahan bakar serta persiapan operasi penangkapan.

Lubis (1989) mengklasifikasikan pelabuhan perikanan berdasarkan jenis dan skala usahanya, yaitu:

1. Pelabuhan perikanan berskala besar atau perikanan laut dalam yaitu pelabuhan untuk perikanan industri atau untuk berlabuh atau bersandarnya kapal-kapal penangkapan berukuran besar dengan panjang 40 sampai 120 meter berat >50 GT.
2. Pelabuhan berskala menengah yaitu pelabuhan untuk perikanan semi industri atau tempat berlabuh atau bertambahnya kapal-kapal penangkapan ikan berukuran 15 sampai 50 GT.
3. Pelabuhan perikanan berskala kecil yaitu pelabuhan untuk perikanan perikanan tradisional atau tempat berlabuh dan bertambahnya kapal-kapal penangkapan berukuran <15 GT.

C. Fungsi Dan Peranan Pelabuhan Perikanan

1. Fungsi Pelabuhan Perikanan

Fungsi dan peranan pelabuhan perikanan mengacu pada keputusan menteri perikanan dan perundangan yang berlaku. Selain harus mengacu pada peraturan yang

berlaku, fungsi Pelabuhan Perikanan juga harus disesuaikan dengan keadaan pelabuhan beserta potensi yang ada.

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi yang bersifat umum (general function) dan fungsi khusus (special function). Fungsi umum merupakan fungsi yang terdapat pada pelabuhan umum atau pelabuhan niaga yang bukan merupakan pelabuhan perikanan. Fungsi khusus dalam hal ini adalah fungsi-fungsi yang berkaitan dengan masalah perikanan yang memerlukan pelayanan khusus yang belum terlayani oleh adanya berbagai fasilitas fungsi umum, seperti fasilitas pengolahan ikan dan pelelangan ikan (Murdiyanto, 2003).

a. Fungsi umum

Berbagai fasilitas yang perlu dibangun untuk memenuhi fungsi umum suatu pelabuhan perikanan, antara lain:

- 1) Jalan masuk yang aman, yang mempunyai kedalaman air yang cukup serta mudah dilayari oleh kapal yang datang dari laut terbuka menuju pintu gerbang masuk pelabuhan;
- 2) Pintu atau gerbang pelabuhan dan saluran navigasi yang cukup aman dan dalam.
- 3) Kolam air yang cukup luas dan dalam serta terlindung dari gelombang dan arus yang kuat untuk keperluan kegiatan kapal di dalam pelabuhan;
- 4) Bantuan peralatan navigasi baik visual maupun elektronik untuk memandu kapal agar dapat melakukan manuver di dalam areal pelabuhan dengan lebih mudah dan aman;
- 5) Bila dipandang perlu, dapat mendirikan bangunan penahan gelombang (breakwater) untuk mengurangi pengaruh atau memperkecil gelombang dan angin badai di jalan masuk dan fasilitas pelabuhan lainnya;
- 6) Dermaga yang cukup panjang dan luas untuk melayani kapal yang berlabuh;
- 7) Fasilitas yang menyediakan bahan kebutuhan pelayaran seperti bahan bakar minyak, pelumas, air minum, listrik, sanitasi dan kebersihan, saluran pembuangan sisa kotoran dari kapal, penanggulangan sampah, dan system pemadam kebakaran;
- 8) Bangunan rumah dan perkantoran yang perlu untuk kelancaran dan pendayagunaan operasional pelabuhan;
- 9) Area di bagian laut dan darat untuk perluasan atau pengembangan pelabuhan;
- 10) Jalan raya atau jalan kereta api/lori yang cukup panjang untuk system transportasi dalam area pelabuhan dan untuk hubungan dengan daerah lain di luar pelabuhan;

- 11) Halaman tempat parkir yang cukup luas untuk kendaraan industri atau perorangan di dalam pelabuhan sehingga arus lalu lintas di kompleks pelabuhan dapat berjalan dengan lancar;
- 12) Fasilitas perbaikan, reparasi, dan pemeliharaan kapal seperti dock dan perbengkelan umum untuk melayani permintaan sewaktu-waktu.

b. Fungsi khusus

Fungsi khusus merupakan tugas pelayanan di pelabuhan perikanan yang membedakan pelabuhan perikanan dari pelabuhan lain yang bukan pelabuhan perikanan. Fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi fungsi khusus pelabuhan perikanan ini, antara lain:

- 1) Fasilitas pelelangan ikan yang cukup luas dan dekat dengan tempat pendaratan.
- 2) Fasilitas pengolahan ikan seperti tempat pengepakan, pengemasan dan cool storage.
- 3) Pabrik es.
- 4) Fasilitas penyediaan sarana produksi penangkapan ikan.

Fungsi pelabuhan perikanan sebagai sarana penunjang untuk meningkatkan produksi terdapat di Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no: KEP.16/MEN/2006, yaitu:

1. Perencanaan, pengembangan, pemeliharaan serta pemanfaatan sarana pelabuhan perikanan.
2. Pelayanan teknis kapal perikanan.
3. Koordinasi pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban, dan pelaksanaan kebersihan kawasan pelabuhan perikanan.
4. Pelaksanaan fasilitas dan koordinasi di wilayahnya untuk peningkatan produksi, distribusi, dan pemasaran hasil perikanan.
5. Pelaksanaan pengawasan penangkapan, penanganan, pengolahan, pemasaran, dan mutu hasil perikanan.
6. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi dan publikasi hasil riset, produksi, dan pemasaran hasil perikanan di wilayahnya.
7. Pemantauan wilayah pesisir dan fasilitas wisata bahari.
8. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

2. Peranan Pelabuhan Perikanan

Peranan pelabuhan perikanan di Indonesia (Sub Direktorat Bina Prasarana Perikanan,1982) adalah:

1. Pusat aktivitas produksi Pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratan ikan, tempat persiapan operasi penangkapan, dan tempat berlabuh yang aman.
2. Pusat distribusi dan pengolahan Pelabuhan perikanan sebagai tempat untuk pengolahan dan pendistribusian ikan.
3. 3. Pusat kegiatan masyarakat nelayan Pelabuhan perikanan sebagai tempat pembangunan ekonomi serta jaringan informasi antar nelayan dan masyarakat.

Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi (Murdiyanto, 2004). Sedangkan, menurut pendapat Lubis (2012) peranan pelabuhan perikanan meliputi beberapa aktivitas antara lain :

- a. Tempat penanganan untuk mempertahankan mutu dan memberikan nilai tambah terhadap hasil tangkapan yang didaratkan.
- b. Mampu melakukan pembongkaran secara cepat dan penyelesaian ikan secara cermat.
- c. Mampu memasarkan ikan yang menguntungkan baik bagi nelayan maupun pedagang, melalui aktivitas pelelangan ikan.

D. Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan

Fasilitas yang tersedia di PPI terdiri dari fasilitas dasar (pokok), fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang.

1. Fasilitas Pokok Pelabuhan Perikanan

Fasilitas pokok atau juga dikatakan infrastruktur adalah fasilitas dasar yang diperlukan dalam kegiatan di suatu pelabuhan. Fasilitas ini berfungsi untuk menjamin keamanan dan kelancaran kapal, baik waktu berlayar keluar masuk pelabuhan maupun sewaktu berlabuh di pelabuhan.

Fasilitas pokok pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang diperlukan untuk kepentingan aspek keselamatan pelayanan, selain itu termasuk juga tempat berlabuh dan bertambat serta bongkar muat kapal. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan terdiri dari :

a. Dermaga

Dermaga adalah suatu bangunan kelautan yang berfungsi sebagai tempat labuh dan bertambatnya kapal, bongkar muat hasil tangkapan, serta tempat mengisi bahan perbekalan untuk keperluan penangkapan ikan di laut.

b. Kolam pelabuhan

Bagian perairan yang menampung kegiatan kapal perikanan atau bongkar muat, berlabuh, mengisi perbekalan dan memutar kapal disebut kolam pelabuhan. Batas kolam pelabuhan umumnya dibatasi oleh daratan, penahan atau batas administrasi pelabuhan.

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1991) kolam pelabuhan dalam pembuatannya harus memenuhi beberapa syarat yaitu :

1. Memiliki luas yang dapat menampung seluruh kapal yang berlabuh dan masih memberikan ruang yang leluasa untuk bergerak bagi kapal.
2. Lebarnya harus dapat digunakan oleh kapal yang berputar dengan bebas, kalau bisa merupakan gerak melingkar yang tidak terputus.
3. Perairannya cukup dalam sehingga kapal terbesar masih mampu untuk berlabuh di saat air sedang surut.
4. Tempatnya terlindungi dari angin, gelombang dan arus yang berbahaya.

c. Pemecah gelombang (*Break water*)

Pemecah gelombang (*break water*) adalah suatu struktur bangunan laut yang berfungsi untuk pantai atau daerah disekitar pantai terhadap pengaruh gelombang laut melindungi kegiatan-kegiatan yang berlangsung di kolam pelabuhan. *Breakwater* sekaligus dapat membentuk kolam pelabuhan. Pemecah gelombang juga berfungsi untuk penahan sedimen dari sekitar pelabuhan (Lubis, 2002).

d. Daratan pelabuhan

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan (1991), bagian darat yang menampung seluruh letak fasilitas pelabuhan disebut daratan pelabuhan. Luas daratan tersebut biasanya 2 - 4 kali luas seluruh fasilitas bilamana semuanya dibangun di atasnya. Penentuan luas daratan pelabuhan ini sebaiknya didasarkan pada perhitungan jangka panjang sehingga nantinya tidak menimbulkan kesulitan dalam perluasan wilayah pelabuhan.

Daratan pelabuhan perlu diberi ketinggian tertentu supaya tidak terendam pada saat air pasang atau disapu oleh gelombang. Ketinggian perlu juga untuk perencanaan *drainasse*. Tinggi daratan pelabuhan minimal 50 cm di atas air laut tinggi. Sedangkan dermaga dan pinggiran lainnya 50 – 70 cm di atas pasang air laut tertinggi tergantung pada tinggi gelombang di kolam pelabuhan tersebut.

e. Kedalaman Perairan

Kedalaman kolam perairan pada suatu pelabuhan perikanan juga sangat menentukan keamanan kapal dalam berlabuh khususnya pada saat permukaan air terendah. Kedalaman perairan ini ditentukan oleh beberapa faktor yaitu: draft kapal

besar dengan muatan penuh, tinggi gelombang maximum dalam kolam pelabuhan ($H_{max} = 50$ cm), tinggi ayunan kapal yang berlayar ($S = 10-30$ cm) dan *clearance* sebagai pengaman antara lunas kapal dan dasar perairan antara 25-100 cm (Elfandi,1995).

2. Fasilitas Fungsional Pelabuhan Perikanan

Fasilitas fungsional adalah fasilitas yang secara langsung dimanfaatkan untuk kepentingan manajemen pelabuhan perikanan dan atau yang dapat diusahakan oleh perorangan atau badan hukum.

- a. Tempat Pemasaran Ikan (TPI);
- b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti telepon, internet, radio komunikasi, rambu-rambu, lampu suar, dan menara pengawas;
- c. air bersih, instalasi Bahan Bakar Minyak (BBM), es, dan instalasi listrik;
- d. tempat pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;
- e. tempat penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
- f. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan, pos pelayanan terpadu, dan perbankan;
- g. transportasi seperti alat-alat angkut ikan;
- h. kebersihan dan pengolahan limbah seperti Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Tempat Pembuangan Sementara (TPS); dan
- i. pengamanan kawasan seperti pagar kawasan.

Menurut Lubis (1989), fasilitas fungsional dapat dikelompokkan menjadi empat bagian berdasarkan fungsinya, yaitu :

- a. Untuk penanganan hasil tangkapan dan pemasarannya, yang terdiri dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pemeliharaan dan pengolahan hasil tangkapan ikan, pabrik es, gudang es, refrigrasi/fasilitas pendingin dari gedung-gedung pemasaran.
- b. Untuk pemeliharaan dan perbaikan armada alat penangkapan ikan, ruang mesin tempat penjemuran alat penangkapan ikan, bengkel, dan gudang jaring.
- c. Untuk perbekalan yang terdiri dari : tangki dan instalasi air minum serta BBM.
- d. Untuk komunikasi yang terdiri dari : stasiun jaringan telepon, radio SSB.

3. Fasilitas Tambahan Pelabuhan Perikanan

Fasilitas tambahan atau penunjang pelabuhan perikanan adalah fasilitas yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan dan

atau memberikan kemudahan bagi masyarakat umum. Fasilitas tambahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas kesejahteraan nelayan terdiri dari : tempat penginapan, kios bahan perbekalan dan alat perikanan, tempat ibadah, serta balai pertemuan masyarakat
2. Fasilitas pengelolaan pelabuhan terdiri dari : kantor, pos penjagaan, perumahan karyawan, mess operator.
3. Fasilitas pengelolaan limbah bahan bakar dari kapal dan limbah industri (Direktorat Jenderal Perikanan, 1994).

Pelabuhan perikanan berperan sebagai terminal yang menghubungkan kegiatan usaha di laut dan di darat ke dalam suatu sistem usaha dan berdaya guna tinggi. aktivitas unit penangkapan ikan di laut harus keberangkatannya dari pelabuhan dengan bahan bakar, makanan, es, dan lain-lain secukupnya. Informasi tentang data harga dan kebutuhan ikan di pelabuhan perlu dikomunikasi dengan cepat dari dari pelabuhan ke kapal di laut.

E. Tingkat Pemanfaatan, Kebutuhan dan Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan

Dalam pelaksanaan pembangunan suatu pelabuhan perikanan, tentunya akan menimbulkan dampak lingkungan (positif maupun negatif), baik didarat, perairan, maupun udara. Dampak adalah suatu usaha atau kegiatan, secara langsung maupun tidak langsung. Dampak juga diartikan sebagai suatu bentuk antara dua kepentingan atau perubahan yang terjadi dalam suatu lingkungan sebagai akibat adanya aktivitas manusia (Lubis, 2012)

Dampak ekonomi dari pembangunan pelabuhan pemanfaatan pelabuhan perikanan diantaranya adalah memberikan keuntungan bagi pihak pengelola maupun pemilik pelabuhan perikanan atau minimum pendapatan pelabuhan seimbang dengan biaya pengoperasiannya. pelabuhan perikanan dapat memberikan suatu nilai atau harga ikan yang layak pada nelayan dan pedagang karena adanya aktivitas pelelangan ikan, sedangkan bagi pengelola, adanya fasilitas pengelola bermanfaat untuk menunjang aktivitasnya. selain itu, nelayan dan pedagang dari pada dibeli dari luar pelabuhan perikanan, juga memberikan nilai tambah terhadap hasil perikanan yang diolah dan dikemas dengan baik.

Tingkat pemanfaatan serta pelaksanaan fungsi pelabuhan berdasarkan literatur yang ada yakni Lubis (2005) dibagi berdasarkan kelompok kepentingan yaitu fungsi maritim, fungsi komersial, dan fungsi jasa. berdasarkan pengamatan langsung fungsi maritim tidak terjadi disana di karenakan tidak ada kontak nelayan dengan pemilik

kapal, dimana pemilik kapal yang secara langsung mengoperasikan kapalnya. sedangkan fungsi komersial terlaksana di PPI dengan baik, karena terjadi proses distribusi perikanan atau jual beli antara masyarakat dengan pedagang ikan melalui transaksi yang terjadi di TPI. Dan untuk fungsi jasa tidak terlaksana secara maksimal hal ini di karenakan tidak adanya jasa penanganan mutu ikan, sedangkan untuk jasa pendaratan ikan dan jasa kapal penangkapan ikan sudah terlaksana (Arsyad, 2012).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004 tentang perikanan pasal 41, fungsi dan peranan pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan dan pemasaran ikan hasil tangkapan. Setelah ikan hasil tangkapan tersebut ditangani dengan baik, maka ikan hasil tangkapan tersebut dapat dipasarkan atau didistribusi. Salah satu upaya pengoperasionalan pelabuhan perikanan adalah pengembangan pelabuhan perikanan sebagai pusat penanganan dan pemasaran ikan (*central marker*), ditempat inilah terjadi pertemuan dan transaksi antara produsen/nelayan dengan konsumen/pembeli Oleh karena itu, dalam suatu kompleks pelabuhan perikanan, fasilitas utama selain pembangunan laut juga dilengkapi dengan pelabuhan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Untuk fungsi pokok pelabuhan perikanan adalah sebagai pusat pengembangan perikanan di bidang produksi, pengelolaan dan pemasaran.

Menurut Merdekawati (2019), tingkat pemanfaatan fasilitas-fasilitas pokok di PPI Lonrae kabupaten Bone yaitu tingkat pemanfaatan dermaga sebesar 108%, maka perlu diperpanjang karena kebutuhan dermaga saat ini 160,71 m. Tingkat pemanfaatan kolam pelabuhan sebesar 45,5%, maka belum perlu dilakukan pengembangan. Tingkat kebutuhan pada kedalaman perairan lebih dalam dari kedalaman perairan saat ini, maka perlu dilakukan penambahan, karena kebutuhan kedalaman perairan saat ini 3 m. Tingkat pemanfaatan daratan pelabuhan sebesar 26% maka belum perlu dilakukan pengembangan.

Menurut Salim (2018). Fasilitas-fasilitas yang ada di PPI Beba belum termanfaatkan secara optimal didapatkan bahwa lahan PPI Beba 21,88 %, dermaga 17.28%, dan TPI 0 %. Perlu adanya usaha dari pihak pelabuhan, nelayan serta semua 11 pengguna fasilitas di PPI Beba untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas PPI di Kabupaten Takalar.

Insani (2005) dalam Agam (2018), kapasitas dan tingkat pemanfaatan fasilitas di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Desa Pulo Sarok Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil Propinsi Nangroe Aceh Darussalam, untuk Tempat Pelelangan Ikan pemanfaatannya hanya 1,91%, dermaga tingkat pemanfaatannya 151,15%, kedalaman kolam pemanfaatannya 48,60%.

Menurut hasil penelitian Hotmaia (2018), tingkat pemanfaatan fasilitas fungsional di PPI Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, yaitu tingkat pemanfaatan pangkalan pendaratan ikan sebesar 221,65%, SPDN sebesar 70,89%, pabrik es sebesar 343,61%, instalasi air bersih 782,50%.

Anggi (2018), Fasilitas fungsional PPN Sibolga yang memiliki tingkat pemanfaatan yang sangat optimal adalah rumah genset dan mesin genset yaitu sebesar 100%, yang belum mencapai optimal adalah tempat pemasaran ikan sebanyak 27%, gedung kantor sebanyak 20,86%, instalasi air sebanyak 64,5% dan pos penyuluhan sebanyak 18,4%, yang belum optimal adalah gedung bengkel dan gudang peralatan TPI yaitu sebesar 0% dan yang dimanfaatkan adalah tempat perbaikan jaring, rambu suar, workshop, kolam limbah (IPAL), dan tempat pengolahan ikan dan tempat penjemuran ikan.

Pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan infrastruktur perikanan dan bagian dari sistem perikanan tangkap. Dengan adanya PP/PPI, aktivitas-aktivitas perikanan tangkap akan lebih teratur dan terarah. Pelabuhan perikanan bukan hanya sebatas menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan, pengolahan dan pendistribusian hasil tangkapan tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap nelayan sebagai pengguna fasilitas yang tersedia sesuai dengan fungsinya. (Atharis, 2008).

Untuk menentukan ukuran fasilitas yang dibutuhkan digunakan analisis teknis. Analisis yang digunakan adalah formula Pianc (1999), formula Dirjen Perikanan (1991) dan formula Yano dan Noda (1970). Formula Pianc (1999) digunakan untuk menganalisis dermaga. Sedangkan Formula Direktorat Jenderal Perikanan (1991) digunakan untuk analisis Kolam Pelabuhan. Formula Yano dan Noda (1970) dipergunakan untuk analisis gedung pelelangan (Agam, 2018)

Menurut Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (2003) strategi pengembangan pelabuhan perikanan dan pangkalan pendaratan ikan adalah untuk menciptakan "kawasan andalan yang strategis, produktif dan cepat tumbuh sebagai sentra produksi dan sentra industri bagi pengembangan ekonomi terpadu "untuk mempunyai /memperoleh hasil yang optimal, dibuat beberapa pendekatan dan penentuan lokasi dan besaran kegiatan pelabuhan perikanan.

Salah satu pengembangan PPI menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (2003) adalah meneliti dan mengkaji ulang seluruh PP/PPI yang sementara ini digolongkan tingkat operasionalnya sangat rendah, guna memperoleh pertimbangan untuk dilaksanakan peningkatan operasional, dan jika perlu peralihan fungsi atau penghapusan.